



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 06/MEN/2010**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2010 - 2014**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010 – 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renstra KKP, yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra KKP, meliputi:

- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
- b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis; dan
- c. Arah Kebijakan dan Strategi, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dukungan lintas sektor.

Pasal 4

Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Renja KKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kebutuhan pendanaan dari masing-masing program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang dituangkan dalam Renja KKP.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), dan *pro-growth* (pertumbuhan). Hasilnya, selama tahun 2005-2008 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil memberikan 3 (tiga) *outcome*, yaitu: (1) pencapaian *pro-poor*, berupa peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dan program pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil yang telah menjangkau lebih dari 200 kab/kota, (2) pencapaian *pro-job*, berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja kumulatif yang mencapai 7,69 juta orang, dan (3) pencapaian *pro-growth*, berupa pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sebesar 5,7%.

Setidaknya terdapat 12 indikator makro kinerja hasil pembangunan kelautan dan perikanan selama 5 tahun terakhir dapat dicatat, yaitu:

1. PDB Sektor Perikanan

PDB sektor perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya untuk PDB kelompok pertanian secara umum, tetapi juga pada PDB nasional. PDB sektor perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2004 adalah Rp53,01 triliun atau sama dengan 16,11% dari PDB kelompok pertanian, atau 2,31% dari PDB nasional. Pada 2008, PDB sektor perikanan meningkat menjadi Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribusi pada PDB kelompok pertanian menjadi sekitar 19,13% atau

kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 2,75%. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2009, PDB perikanan mencapai Rp83,15 triliun atau memberikan kontribusi 3,4% terhadap PDB tanpa migas dan 3,1% terhadap PDB nasional. Apabila dilihat berdasarkan harga konstan, maka pertumbuhan perikanan mencapai 5,74% per tahun yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB kelompok pertanian yang tumbuh 3,57% per tahun. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009, PDB perikanan tercatat mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36% terhadap PDB tanpa migas dan 3,12% terhadap PDB Nasional. Perkembangan PDB sektor perikanan sebagaimana tersebut pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Produk Domestik Bruto Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2004-2008

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009 s/d Triwulan III	Kenaikan rata-rata 2004-2008 (%)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	329.124,60	364.169,30	433.223,40	541.592,60	713.291,40	654.664,70	21,58
a. Tanaman Bhn Makanan	165.558,20	181.331,60	214.346,30	265.090,90	347.841,70	331.955,10	20,66
b. Tanaman Perkebunan	49.630,90	56.433,70	63.401,40	81.595,50	106.186,40	84.936,50	21,22
c. Peternakan	40.634,70	44.202,90	51.074,70	61.325,20	82.835,40	76.022,90	19,87
d. Kehutanan	20.290,00	22.561,80	30.065,70	35.883,70	39.992,10	32.942,10	18,81
e. Perikanan	53.010,80	59.639,30	74.335,30	97.697,30	136.435,80	128.808,10	27,06
Produk Domestik Bruto	2.295.826,20	2.774.281,10	3.339.216,80	3.949.321,40	4.954.028,90	4.131.144,80	21,23
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	2.083.077,90	2.458.234,30	2.967.040,30	3.532.807,70	4.426.384,70	3.828.845,50	20,77
% PDB Perikanan thd :							
- Kelompok Pertanian	16,11	16,38	17,16	18,04	19,13	19,68	
- PDB Total	2,31	2,15	2,23	2,47	2,75	3,12	

Sumber : BPS, 2009

(*Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara)

2. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Nilai tukar digunakan untuk mempertimbangkan seluruh penerimaan (*revenue*) dan seluruh pengeluaran (*expenditure*) keluarga nelayan maupun pembudidaya ikan. Selain itu, juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan dan

pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga Desember 2008 terjadi peningkatan sebesar 4,21% dibandingkan pada awal tahun bulan Januari 2008. Artinya, pada akhir tahun 2008, nelayan telah dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Berdasarkan hasil perhitungan BPS sampai pada bulan Agustus 2009, nilai NTN mencapai 106,42 atau mengalami peningkatan sebesar 5,44% dibandingkan tahun 2008 pada periode bulan yang sama dengan nilai sebesar 100,92, sebagaimana tersebut pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Nilai Tukar Nelayan dan Petani Tahun 2008 dan 2009

Tahun 2008

Bulan	Nelayan (NTN)	Perubahan (%)	Petani (NTP)	Perubahan (%)
Januari	99,67	0,00	100,69	0,00
Pebruari	100,43	0,76	100,59	-0,10
Maret	99,45	-0,98	98,79	-1,79
April	99,66	0,21	99,05	0,26
Mei	100,64	0,98	100,16	1,12
Juni	100,28	-0,36	100,64	0,48
Juli	100,42	0,14	101,71	1,06
Agustus	100,92	0,50	102,00	0,29
September	102,73	1,79	101,69	-0,30
October	103,01	0,27	99,20	-2,45
Nopember	102,53	-0,47	98,36	-0,85
Desember	103,92	1,36	98,99	0,64

Tahun 2009

Bulan	Nelayan (NTN)	Perubahan (%)	Petani (NTP)	Perubahan (%)
Januari	105,34	1,37	98,30	-0,70
Pebruari	105,82	0,46	98,77	0,48
Maret	104,91	-0,86	98,78	0,01
April	105,50	0,56	99,26	0,49
Mei	105,64	0,13	99,41	0,15
Juni	105,83	0,18	99,56	0,15
Juli	105,90	0,07	99,82	0,26
Agustus	106,42	0,49	100,24	0,68

Sumber : BPS, 2009

3. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tahun 2008 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya mencapai 9,05 juta ton. Dari total produksi tersebut perikanan budidaya menyumbang 47,49%. Laju pertumbuhan produksi perikanan nasional sejak tahun 2005-2009 mencapai 10,02% per tahun, dimana pertumbuhan budidaya sebesar 21,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 2,95%. Sedangkan nilai produksi perikanan meningkat 15,61% dari Rp57,62 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp102,78 triliun pada tahun 2009. Jika dibandingkan pertumbuhan volume produksi terhadap nilai, maka pertumbuhan nilai lebih tinggi dari pada pertumbuhan volume. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum komoditas perikanan mengalami peningkatan kualitas dan kenaikan harga. Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut pada tabel 3 dan tabel 4 berikut:

Tabel 3. Volume Produksi Perikanan Tahun 2005-2009 (Ton)

Rincian	Tahun					Kenaikan rata-rata (%)
	2005	2006	2007	2008	2009*)	2005-2009
Penangkapan :	4 705 869	4 806 112	5 044 737	5 196 328	5 285 020	2,95
Perikanan laut	4 408 499	4 512 191	4 734 280	4 701 933	4 789 410	2,11
Perairan umum	297 370	293 921	310 457	494 395	495 610	15,99
Budidaya :	2 163 674	2 682 596	3 193 565	3 855 200	4 780 100	21,93
Budidaya Laut	890 074	1 365 918	1 509 528	1 966 002	2 437 100	29,54
Tambak	643 975	629 610	933 833	959 509	1 180 700	17,97
Kolam	331 962	381 946	410 373	479 167	593 800	15,80
Karamba	67 889	56 200	63 929	75 769	93 900	9,75
Jaring Apung	109 421	143 251	190 893	263 169	336 300	32,46
Sawah	120 353	105 671	85 009	111 584	138 300	5,86
JUMLAH	6 869 543	7 488 708	8 238 302	9 051 528	10 065 120	10,02

*) Angka Sementara

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009

Tabel 4. Nilai Produksi Perikanan Tahun 2005-2009

(jutaan rupiah)

Rincian	Tahun					Kenaikan rata-rata (%)
	2005	2006	2007	2008	2009 *)	
Total Nilai	57 622,78	63 845,14	76 360,22	89 454,45	102 783,05	15,61
Penangkapan :	36 171,33	40 069,05	48 431,93	51 611,69	56 077,35	11,72
Perikanan laut	33 255,30	37 162,91	45 025,65	46 598,55	50 863,53	11,39
Perairan umum	2 916,03	2 906,14	3 406,28	5 013,13	5 213,82	17,01
Budidaya :	21 451,44	23 776,08	27 928,28	37 842,76	46 705,70	21,81
Budidaya Laut -	3 141,86	1 996,13	4 035,58	9 241,94	11 678,11	55,27
Tambak	13 201,27	15 713,29	16 408,28	17 304,47	19 404,91	10,26
Kolam	2 929,13	3 481,15	4 237,90	6 805,93	8 736,65	32,39
Karamba	670,31	583,66	788,21	1 620,25	2 930,91	52,14
Jaring	645,85	1 093,62	1 690,27	1 493,77	1 996,60	36,48
Sawah	862,99	908,21	768,01	1 376,38	1 958,49	27,83

*) Angka Sementara

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009

Sementara itu, perkembangan produksi olahan ikan selama kurun waktu 2005 sampai 2008 meningkat sebesar 10,20% per tahun yaitu dari 2,74 juta ton menjadi 3,66 juta ton pada tahun 2008. Perolehan ini berdasarkan produksi hasil perikanan tangkap yang merupakan pemasok bahan baku untuk semua produk olahan. Disamping sumber dari produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan produksi olahan khususnya dari rumput laut dan beberapa jenis ikan hasil budidaya seperti patin, nila, bandeng dan beberapa jenis lainnya. Produksi rumput laut merupakan salah satu andalan yang masih terus dapat ditingkatkan, peningkatan dilakukan melalui fasilitasi dan beberapa program pemerintah yang khusus menangani rumput laut.

4. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2009 mencapai 6,43 juta orang atau mengalami peningkatan sebesar 3,41% dari tahun 2005. Jumlah tenaga kerja di bidang pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan dalam periode 2005 – 2009 mengalami peningkatan sebesar 10,82% yakni dari 0,53 juta orang pada tahun 2005 menjadi 0,79 juta orang pada tahun 2009. Peningkatan penyerapan tenaga kerja perikanan selama tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja Perikanan Tahun 2005-2009
(juta orang)

No.	Rincian	2005	2006	2007	2008	2009*)	Kenaikan (%) 2006-2008
1	Perikanan tangkap	2,59	2,70	2,76	2,74	2,75	1,55
2	Perikanan budidaya	2,51	2,28	2,34	2,76	2,83	3,49
3	Pengolahan dan pemasaran	0,53	0,55	0,59	0,65	0,79	10,82
4	Jasa penunjang	dta	0,06	0,04	0,06	0,06	8,33
Jumlah		5,4	5,63	5,59	5,73	6,21	6,43

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009

Ket. : - *) : angka sementara,

- Jasa penunjang : tenaga kerja yang terlibat pada program-program pemberdayaan: SPDN, kedai pesisir, COREMAP, penyuluh, dll.

- dta : data tidak tersedia

5. Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Dalam Negeri

Penyediaan ikan untuk konsumsi domestik meningkat sebesar 8,74% per tahun yakni dari 4,9 juta ton pada tahun 2004 menjadi 6,85 juta ton pada tahun 2008. Konsumsi ikan per kapita meningkat menjadi 7,35% per tahun yakni dari 22,58 kg/kapita menjadi 29,98 kg/kapita pada tahun 2008. Sampai dengan tahun 2009 diperkirakan konsumsi ikan dapat mencapai 30,17 kg/kapita, sebagaimana tersebut pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Tahun 2004-2008

Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%) 2004-2008
	2004	2005	2006	2007	2008*)	
Total (1000 Ton)	4 901,13	5 249,57	5 759,21	6 380,66	6 850,69	8,74
Per Kapita (Kg/Kap/Th)	22,58	23,95	25,94	28,28	29,98	7,35

Keterangan : *) angka sementara

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009

Peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (*capture*) maupun budidaya (*aquaculture*) tersedia dengan baik. Selain itu, peningkatan tersebut juga menggambarkan bahwa kebijakan peningkatan konsumsi ikan nasional, pengembangan sarana pemasaran hasil perikanan, penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, penguatan informasi pemasaran dalam negeri serta promosi dan kerjasama pemasaran di dalam negeri berjalan dengan baik.

6. Ekspor Hasil Perikanan

Meskipun volume ekspor hasil perikanan pada periode 2005-2009 mengalami penurunan yang sangat kecil sebesar 1,42%, namun kenaikan nilai ekspor hasil perikanan terjadi cukup signifikan sebesar 6,17% per tahun, yakni dari US\$1,92 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$2,37 miliar pada tahun 2009. Terjadinya kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan volumenya menunjukkan adanya peningkatan harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, antara lain disebabkan sebagian besar komoditas ekspor telah mengarah pada produk bernilai tambah (*non primary product*). Sedangkan jika dilihat nilai impor komoditas perikanan, sampai tahun 2009 mencapai nilai sebesar US\$195,48 juta dengan perkembangan per tahun sebesar 18,5%. Dengan demikian, neraca perdagangan komoditas perikanan masih mengalami surplus yang cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata 5,54% per tahun dalam periode 2005-2009. Pertumbuhan nilai ekspor - impor dan neraca perdagangan hasil perikanan selama tahun 2005-2009, sebagaimana tersebut pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor-Import serta Neraca Perdagangan Tahun 2004-2008

Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%) 2005 - 2009
	2005	2006	2007	2008	2009 *)	
Volume ekspor (ton)	857 782	926 478	854 328	911 674	796 700	-1,42
Volume Impor (ton)	151 008	184 240	145 227	280 179	218 622	17,38
Nilai ekspor (US\$ 1000)	1 912 926	2 103 471	2 258 920	2 699 683	2 371 000	6,17

Rincian	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%) 2005 - 2009
	2005	2006	2007	2008	2009 *)	
Nilai Impor (US\$ 1000)	126 960	165 720	142 750	259 967	195 486	18,50
Neraca Perdagangan (US\$ 1000)	1 785 966	1 937 751	2 116 170	2 439 707	2 175 514	5,54

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009

Terjadinya peningkatan nilai ekspor hasil perikanan ini disebabkan oleh arah kebijakan ekspor yang semakin baik, yang ditandai dengan diarahkannya tujuan ekspor dari pasar-pasar tradisional (Jepang, USA dan UE) ke pasar-pasar prospektif (Korea Selatan, China, Malaysia dan Timur Tengah). Salah satu kerjasama yang telah dijalin dengan pasar prospektif adalah ditandatanganinya "*Cooperation Agreement on Safety Assurance in the Import and Export of Aquatic Products*" yang merupakan pencabutan embargo produk perikanan Indonesia di China oleh otoritas kompeten *Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China* (AQSIQ).

Di samping itu, peningkatan ekspor tersebut merupakan dampak dari penurunan kasus *Rapid Alert System* (RAS) yang menimpa produk perikanan Indonesia di pasar luar negeri. Penurunan kasus RAS ini membuktikan meningkatnya kepercayaan Komisi Eropa atas upaya serius dan komitmen tinggi otoritas kompeten Indonesia beserta seluruh *stakeholders* dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara konsisten. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mendapatkan kembali hak untuk mengajukan *Approval Number (Re-authorized for Approval Number)* baru bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan mengekspor ke Uni Eropa. Saat ini otoritas kompeten telah mengusulkan *Approval Number* secara bertahap untuk sekitar 24 UPI baik yang baru maupun *relisting*.

7. Investasi bidang Kelautan dan Perikanan

Secara kumulatif sepanjang tahun 2004-2008, investasi di sektor perikanan mencapai 6 proyek Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dengan total nilai Rp8,2 miliar dan 22 proyek Penanaman Modal Asing (PMA)

dengan nilai US\$71 juta. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2005 untuk PMDN dan tahun 2006 untuk PMA. Secara keseluruhan investasi di sektor perikanan baik PMDN maupun PMA masih sangat kecil jika dibanding nilai investasi secara nasional. Persentase kontribusi investasi sektor perikanan masih di bawah 1% terhadap investasi nasional. Kecilnya kontribusi ini berakibat kecilnya penyerapan tenaga kerja dari perkembangan investasi sektor perikanan. Perkembangan investasi sektor perikanan tahun 2004-2008 sebagaimana tersebut pada tabel 8 berikut:

Tabel 8. Perkembangan Investasi Sektor Perikanan Tahun 2004-2008

Tipe	Tahun									
	2004		2005		2006		2007		2008	
	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
PMDN	-	-	4	4,9	1	0,2	1	3,1	0	0,0
PMA	2	5,3	7	5,8	5	32,8	5	24,7	3	2,4
PMDN Nasional	130	15 409,4	214	30 665,0	164	20 788,4	159	34 878,7	106,0	8 496,6
PMA Nasional	546	4 602,3	909	8 914,6	867	5 977,0	603	7 305,2	544	10 380,6
% thd PMDN Nasional	0,00	0,00	1,87	0,02	0,61	0,00	0,63	0,01	0,00	0,00
% thd PMA Nasional	0,37	0,12	0,77	0,07	0,58	0,00	0,66	0,33	0,37	0,02

Sumber : BKPM, 2008

P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan

I : Nilai Realisasi Investasi (PMDN dalam Rp miliar; PMA dalam US\$ juta)

8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Penanggulangan *Illegal Fishing* dan Penyelamatan Kekayaan Negara

Hasil operasi kapal-kapal patroli terutama di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selama beberapa tahun terakhir menunjukkan *trend* bahwa peningkatan hari operasi patroli berbanding lurus secara proporsional dengan jumlah kapal *illegal* yang ditangkap. Selama kurun waktu 2005-2009 hasil operasi kapal pengawas telah berhasil di *ad hoc* kapal perikanan

yang terindikasi melakukan tindak pidana perikanan sebanyak 827 kapal perikanan yang terdiri dari 466 kapal ikan Indonesia (KII) dan 361 kapal ikan asing (KIA).

Pada kurun tahun 2009 jumlah kapal ikan asing yang ditenggelamkan mencapai 32 kapal dan 17 kapal lainnya dipulangkan ke negara asalnya. Sejalan dengan peningkatan tersebut, kerugian negara yang bisa diselamatkan selama 2005-2009 mencapai Rp1,9 triliun.

Selain operasi pengawasan dengan kapal pengawas perikanan dilakukan juga operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI AL, POLRI dan BAKORKAMLA. Hasil kerjasama operasi pengawasan tersebut selama tahun 2005-2009 telah berhasil menangkap kapal perikanan yang terindikasi melakukan tindak pidana perikanan sebanyak 302 kapal perikanan.

b. Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Pada 2005-2009 telah dilakukan penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan sebanyak 616 kasus yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Hasil penanganan tindak pidana perikanan tersebut telah berhasil dirampas/dilelang sebanyak 145 kapal. Langkah percepatan penyelesaian penanganan tindak pidana perikanan, KKP bekerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) membentuk pengadilan khusus perikanan, melalui SKB/dasar hukum pembentukan pengadilan *ad hoc* ini, di 5 lokasi yaitu Jakarta (DKI Jakarta), Belawan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Bitung (Sulawesi Utara) dan Tual (Maluku). Pengadilan Perikanan tersebut telah di lengkapi dengan sarana dan prasarana pengadilan dengan 47 hakim *ad hoc* pengadilan perikanan.

9. Penamaan Pulau (Toponimi)

Sejak tahun 2005, KKP sesuai dengan fungsinya dipercaya secara nasional melakukan pekerjaan lapangan (*field work*), untuk inventarisasi dan penamaan pulau (toponimi) di seluruh wilayah NKRI dengan melibatkan instansi terkait. Pelaksanaan inventarisasi dan toponim pulau telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008 dan selanjutnya diverifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden

Nomor 112 Tahun 2006. Hasil verifikasi oleh tim tersebut terdapat 13.427 pulau di 33 Provinsi, sebagaimana tersebut pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Daftar Nama Pulau yang telah dilaporkan ke PBB Tahun 2007

No.	Provinsi	Jumlah Pulau
1	Sumatera Selatan	23
2	Kep. Bangka Belitung	470
3	Jawa Timur	445
4	Sulawesi Utara	286
5	Gorontalo	123
6	Maluku	294
7	Maluku Utara	805
8	Jawa Tengah	33
9	DI Yogyakarta	28
10	Jawa Barat	10
11	Sulawesi Tenggara	530
12	Lampung	130
13	Bengkulu	10
14	Kep. Riau	1,794
Total		4,981

Sumber, Ditjen KP3K, 2009

10. Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)

Tujuan pengelolaan BMKT selain mendukung upaya pelestarian dan pengkayaan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahari Indonesia adalah untuk meningkatkan pengelolaan potensi BMKT yang tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan seimbang antara ekonomis dan non ekonomis. Pengelolaan BMKT yang meliputi ruang lingkup kegiatan survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT agar dapat dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan negara. Pemerintah membentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan kapal yang tenggelam (PANNAS BMKT) yang melibatkan instansi pemerintah terkait sesuai Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007. Sampai dengan tahun 2009, langkah yang telah ditempuh antara lain:

- 1) Pendistribusian BMKT yang tidak terjual ke Museum Negeri Adityawarman, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar, dan Badan Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT)-Sumatera Barat untuk mendukung pengkayaan koleksi museum, pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup pemanfaatan nonekonomis, disamping itu telah dilakukan pemilihan terhadap BMKT tertentu yang langka untuk kepentingan sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sebagai koleksi negara.
- 2) Penjualan BMKT untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya dilaksanakan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta berdasarkan rekomendasi penjualan/lelang BMKT dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21 November 2008.
- 3) Penerbitan rekomendasi survei sebanyak 11 buah dan rekomendasi pengangkatan sebanyak 2 buah.

11. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Konservasi merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan suatu wilayah atau sumber daya ikan dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan keseimbangan sumber daya ikan dan ekosistemnya di dalam suatu kawasan tertentu. Upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan Kawasan Konservasi Perairan baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar dan payau. Sampai akhir tahun 2009 telah tercapai 13,529,067.66 ha, sebagaimana tersebut pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi Laut di Indonesia Tahun 2009

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
A	Inisiasi Dephut	40	5.426.092
	- Taman Nasional Laut	7	4.045.049
	- Taman Wisata Alam Laut	18	767.610
	- Suaka Margasatwa	7	339.218
	- Cagar Alam Laut	9	274.215

No	Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)
B	Inisiasi Pemda dan DKP	36	20.270.629
	- Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Taman Nasional Perairan Laut Sawu)	1	3.521.130
	- Kawasan Konservasi Laut Daerah	24	3.155.572
	- Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah	19	13.591.406
	- Daerah Perlindungan Laut/Mangrove (DPL/DPM)	2	2.086
	- Suaka Perikanan	3	453
	Jumlah Total	89	

Sumber : Diolah dari Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009

Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu seluas 3,5 juta hektar dideklarasikan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 38 tahun 2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Perairan Laut Sawu mencakup (1) wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya dan (2) Wilayah Perairan Pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan sekitarnya. Pencadangan kawasan seluas 3,5 juta hektar tersebut didasari oleh beberapa pertimbangan ilmiah diantaranya, kawasan ini merupakan tempat migrasi 14 spesies dari 27 spesies *Cetacean* di dunia, termasuk paus jenis *rare blue whale* dan *sperm whales*, habitat hidup 4 spesies penyu, 336 spesies ikan, dan 500 spesies karang.

12. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan

Pengembangan SDM di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dan dilaksanakan melalui bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Satuan pendidikan lingkup KKP adalah Sekolah Tinggi Perikanan (STP) di Jakarta, Akademi Perikanan Sidoarjo, Akademi Perikanan Bitung, Akademi Perikanan Sorong dan 8 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang tersebar di wilayah nusantara. Lulusan pendidikan sejak 2005-2009 berjumlah 6.029 siswa.

Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang pelatihan diselenggarakan dalam bentuk pelatihan bagi masyarakat (non aparatur) dan aparatur (pusat dan daerah). Pelatihan bagi masyarakat ditujukan untuk nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, pedagang ikan dan masyarakat perikanan yang meliputi teknik penangkapan ikan, pelatihan pengolahan dan mutu, serta pemasaran dan manajemen usaha. Sedangkan pelatihan bagi aparatur antara lain pelatihan teknis aparatur, pelatihan struktural aparatur, dan pelatihan prajabatan dengan jumlah peserta pelatihan tahun 2005-2009 mencapai 27.778 orang.

Pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui bidang penyuluhan diarahkan pengembangan keahlian dan keberpihakan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan, serta meningkatkan citra penyuluhan. Jumlah penyuluh perikanan sebanyak 4.534 orang tersebar di 33 Provinsi, sampai dengan tahun 2009 KKP telah memberikan biaya operasional penyuluh (BOP) perikanan bagi 2.342 penyuluh.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (*World Resources Institute*, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km², mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km². Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*); dan sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat

dikembangkan untuk pembangunan kelautan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.

Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b) budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, (d) budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta (e) bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan. Selain itu juga terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi (1) pengembangan pulau-pulau kecil, (2) pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, (3) pemanfaatan air laut dalam (*deep sea water*), (4) industri garam rakyat, (5) pengelolaan pasir laut, (6) industri penunjang, dan (7) keanekaragaman hayati laut.

Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah lingkup tugas KKP dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US\$82 miliar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap sebesar US\$15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$46,7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US\$1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang

kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholders lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.

Di samping adanya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, terdapat pula potensi kelembagaan, antara lain seperti peranan Komisi Tuna Indonesia, Komisi Udang, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), LSM bidang kelautan dan perikanan, dan lain-lain, diharapkan di masa datang perlu terus disinergikan. Potensi lain adalah potensi sarana dan prasarana yang telah dimiliki, seperti unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan, budidaya, pengujian mutu dan pengolahan hasil perikanan, riset, dan sekolah perikanan.

Berdasarkan laporan FAO Year Book 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen perikanan dunia disamping China, Peru, USA dan beberapa negara kelautan lainnya. Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai dengan tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Secara umum, tren perikanan tangkap dunia mulai menurun seiring dengan peningkatan kegiatan perikanan tangkap dan terbatasnya daya dukung sumber daya perikanan dunia.

Di samping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya dunia. Sampai dengan tahun 2007 posisi produksi perikanan budidaya Indonesia di dunia berada pada urutan ke-4 dengan kenaikan rata-rata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Secara umum, tren perikanan budidaya dunia terus mengalami kenaikan, sehingga masa depan perikanan dunia akan terfokus pada pengembangan budidaya perikanan.

Apabila dilihat dari kontribusi sektor perikanan pada PDB nasional di negara-negara Asia-Pasifik masih didominasi perikanan tangkap, namun secara bertahap, sumber produksi perikanan mulai bergeser ke kegiatan budidaya perikanan. Kebijakan pengembangan perikanan Indonesia ke depan akan lebih didominasi oleh kegiatan

perikanan budidaya. Kondisi ini sejalan dengan tren perkembangan perikanan dunia.

Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena kontribusi perikanan pada 2004-2009 terus mengalami kenaikan. Disamping itu potensi-potensi lainnya mulai perlu dikelola, seperti sumber daya yang tidak terbaharukan, agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan terintegrasi dan konvergen untuk membangun ocean economic dalam 3 pilar (a) *National Ocean Policy*, (b) *National Ocean Economic Policy*, dan (c) *National Ocean Governance*.

Melihat potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, maka tantangan lain yang timbul adalah maraknya kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal ikan asing yang diakibatkan oleh industri perikanan negara-negara tetangga harus bertahan, fishing ground negara tetangga makin habis sedangkan permintaan industri ikan dunia yang meningkat, disparitas harga ikan, perairan Indonesia terbuka dan terbatasnya sarana pengawasan. Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan dengan sarana dan prasarana pengawasan, SDM pengawasan, regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah serta dukungan internasional yang kuat untuk menanggulangi illegal fishing dan legitimasi kegiatan pengawasan, dengan adanya UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi menjadi UU Nomor 45 tahun 2009 serta UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

2. Permasalahan

Sumber daya ikan yang berada di perairan Indonesia baik laut maupun perairan umum cenderung mengalami degradasi dalam satu dekade terakhir ini, utamanya yang berada di perairan umum daratan maupun perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas sumber daya ikan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran perairan baik laut maupun tawar, kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*),

penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan (*overfishing*) yang dilakukan secara *illegal* baik oleh pelaku dalam negeri, seperti penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan (bahan peledak, racun, listrik dan obat bius), penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan izin dan yang tidak berizin, maupun oleh pihak asing yang melakukan praktik-praktik *illegal* di Indonesia.

Kondisi penurunan sumber daya ikan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi secara nyata (*significant*) melalui kegiatan perikanan tangkap.

Gambaran mengenai kondisi tersebut memberikan tantangan bagi Indonesia untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya, sementara upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan laut dan perairan umum, kapasitas dan cakupannya terus ditingkatkan. Kegiatan perikanan budidaya diprediksi mampu menaikkan produksi perikanan secara nyata. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun tetap berada di bawah ancaman kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi lingkungan harus benar-benar menjadi perhatian dalam mengawal target produksi ikan sebagai produsen terbesar.

Produktivitas para nelayan Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan armada perikanan yang secara nasional masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal ikan berukuran 0,5 sampai 3 *gross tonnage* (GT). Kelemahan dari penggunaan armada kecil antara lain para nelayan memiliki hari layar yang singkat (*one day fishing*), daya tampung ikan hasil tangkapan yang kecil, kualitas ikan yang kurang terjaga atau tingginya tingkat kehilangan mutu (*losses*), yang berakibat pada daya jual yang rendah, sementara biaya produksi terus meningkat. Kondisi seperti ini, ditambah dengan keterbatasan untuk memanfaatkan dana perbankan, semakin menyulitkan para nelayan untuk keluar dari jerat kemiskinan yang melilit dari tahun ke tahun.

Di samping itu, masalah sarana dan prasarana perlu menjadi fokus yang mesti diatasi, khusus di sentra-sentra usaha dan pelabuhan perikanan di daerah yang merupakan pusat kegiatan perikanan bagi para nelayan dan pemasar

(pedagang) ikan. Sentra-sentra tersebut merupakan sarana vital untuk distribusi produk secara efisien dan penyedia stok ikan untuk konsumsi masyarakat, dan juga berperan sebagai penyedia informasi pasar. Dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini, KKP telah memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran ikan di daerah, baik melalui dukungan penyediaan jenis-jenis kegiatan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana tugas pembantuan (TP).

Namun demikian, pembangunan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran seperti pelabuhan perikanan klas pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Kabupaten/Kota relatif membutuhkan anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Untuk membangun sarana dan prasarana ini umumnya membutuhkan anggaran pada kisaran antara Rp20 miliar atau 60 miliar untuk PPI dan TPI, serta antara Rp15 miliar atau 25 miliar per unit BBI. Dari alokasi anggaran yang tersedia pada 5 tahun terakhir, baik melalui DAK maupun TP rata-rata teralokasikan kurang dari Rp5 miliar, sehingga pembangunan PPI, TPI dan BBI cenderung tidak dapat tuntas untuk mendukung tugas dan fungsinya secara optimal.

Pada beberapa daerah tertentu yang telah mendapat alokasi anggaran yang besar mampu membangun beberapa unit BBI, PPI, dan TPI dengan kualitas yang baik dan berfungsi optimal, serta memenuhi standar sanitasi dan higienis, walaupun jumlahnya relatif sedikit dan umumnya terdapat di daerah-daerah yang relatif sudah maju seperti di wilayah Jawa - Bali, Sumatera dan Sulawesi. Di sisi lain, ada juga daerah yang belum secara optimal memanfaatkan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran yang telah dibangun karena kurangnya ketersediaan SDM yang mumpuni.

Dalam kurun 5 tahun ke depan, diperlukan perbaikan kualitas sarana dan prasarana BBI, PPI dan TPI yang jumlahnya mencapai hampir 600 BBI dan lebih dari 750 unit PPI/TPI di seluruh Kabupaten/Kota yang diikuti dengan penyiapan SDM yang handal. Kondisi sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran yang kurang berfungsi optimal di lokasi-lokasi sentra usaha kelautan dan perikanan dan pelabuhan perikanan di daerah menjadi faktor

penghambat dalam upaya meningkatkan produksi yang tinggi.

Tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia pada negara-negara maju turut mengetatkan persyaratan mutu produk ekspor hasil perikanan dari Indonesia ke negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, dan Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun merupakan negara tujuan ekspor perikanan Indonesia. Sebagai akibatnya, Indonesia dituntut untuk mampu menyediakan produk yang berkualitas lebih tinggi mulai dari tahap produksi (*on farm*), pengolahan, dan distribusi yang dibuktikan melalui proses pengujian dan sertifikasi. KKP bersama Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan mutu produk perikanan untuk memenuhi persyaratan yang semakin ketat.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan yang semakin ketat itu. Beberapa hal diantaranya terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana pengujian di beberapa Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan beberapa diantaranya belum terakreditasi, kurangnya pemahaman pengawas mutu dan *stakeholder* terkait terhadap ketentuan kebijakan internasional, serta terbatasnya jumlah dan kompetensi inspektur. Proses penerbitan *health certificate* masih memakan waktu lama, terbatasnya penerapan standar nasional Indonesia (SNI) pada UPI skala kecil dan terbatasnya surveilensi penerapan pengendalian mutu di UPI dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (*quality assurance dan food safety*), serta masih ditengarai adanya penyimpangan pelaksanaan pembuatan sertifikasi ekspor. Kondisi ini menyebabkan beberapa kasus penolakan produk perikanan oleh negara-negara tujuan ekspor.

Luasnya wilayah perairan Indonesia dan ZEEI yang mencapai 5,8 juta Km² merupakan lahan subur bagi para pelaku penangkapan ikan secara *illegal*, kecenderungan meningkatkan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*, perusakan ekosistem pesisir, pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) secara *illegal* oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan asing yang merugikan negara bila kurang pengawasan, serta rendahnya ketaatan kapal

perikanan dan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan menjadi kurang optimal utamanya karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diikuti dengan kurang optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan, dan kurangnya koordinasi lintas sektor serta dukungan internasional. KKP terus melakukan penguatan dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sampai tahun 2009, telah memiliki 23 unit kapal pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap ribuan kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia.

Sarana pengawasan lainnya berupa pemasangan *Vessel Monitoring System* (VMS) pada seluruh kapal perikanan asing dan kapal perikanan Indonesia dengan ukuran di atas 100 GT dan telah terpasang 3.169 transmitter. Di samping itu, telah pula dilengkapi sarana pengawasan untuk 1.369 kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas). Meskipun ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan telah bertambah, namun masih dirasa belum optimal mengingat luasnya jangkauan pengawasan dan jumlah kapal pengawas perikanan yang ada.

Permasalahan lain yang muncul adalah konflik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih sering terjadi di era otonomi daerah dan pemekaran wilayah belakangan ini. Ditengarai penyebabnya antara lain, disamping dipicu oleh keterbatasan sumber daya ikan serta ketimpangan sosial ekonomi, juga karena belum terpenuhinya aturan yang jelas tentang tata ruang kawasan pesisir dan laut, termasuk sosialisasi ke masyarakat. Meskipun telah terbit Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, beberapa aturan turunannya masih belum selesai secara keseluruhan.

Konflik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dapat terjadi antara nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil/tradisional, pengusaha mutiara, pemilik tanah, pengembang pariwisata, pemangku adat, dan termasuk antar instansi yang terjadi tumpang tindih kewenangan. Konflik di daerah perairan pesisir dan laut, serta pulau-pulau

kecil dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat pesisir pada umumnya termasuk nelayan dan pembudidaya ikan, serta mengganggu usaha mereka. Oleh karena itu, resolusi konflik dan kelengkapan perangkat pertauran dan perundangan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami. Beberapa lokasi rawan bencana alam misalnya Nanggroe Aceh Darussalam, Nias Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Selatan Jawa, NTT dan NTB, Sulawesi, Maluku, serta Papua. Kejadian bencana alam hampir terjadi setiap tahun dengan lokasi yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain utamanya di wilayah-wilayah tersebut.

Bencana alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa. Indonesia tidak dapat menghilangkan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi berulang tersebut, namun hanya dapat mengurangi dampaknya melalui upaya mitigasi bencana serta membangun sarana dan prasarana yang ramah terhadap bencana. Sejak peristiwa tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2004 yang lalu, perhatian Pemerintah pada umumnya, dan KKP pada khususnya mulai melakukan upaya nyata untuk mitigasi bencana alam serta memperkenalkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan kepada masyarakat pesisir dan masyarakat luas, serta melakukan kerja sama lintas sektor dan kerja sama internasional. Ke depan, upaya mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta lokasi yang menjadi sentra-sentra pembangunan kelautan dan perikanan haruslah menjadi perhatian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.** Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh KKP diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut :

A. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah **Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.**

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah **Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan**.

C. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah:

1. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.
2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.
 - b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.
 - c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan:
 - a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
 - b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan.
 - c. Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
 - d. Indonesia bebas *Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan:
 - a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang *bankable*.
 - b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
 - c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.

4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional:
 - a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
 - b. Indonesia menjadi *market leader* dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN II tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Renstra KKP) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia. Kerangka Visi dan Misi Indonesia 2014 adalah:

Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera Demokratis dan Berkeadilan

- Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
- Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
- Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
- Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
- Agenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Terkait dengan visi, misi dan agenda utama pembangunan nasional tersebut, maka perumusan dan penjabaran operasionalnya dituangkan dalam 11 prioritas nasional yakni: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dalam prioritas nasional tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 yang terkait dengan 5 prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;** Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.
2. **Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan;** Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.
3. **Prioritas 5: Ketahanan Pangan;** Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.
4. **Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;** Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

5. **Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik;** Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

Di samping 5 (lima) Prioritas Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang, yakni Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan; Lintas Bidang Perubahan Iklim Global dan Lintas Bidang Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan.

Pembangunan kelautan dan perikanan berada dalam lingkup Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.

Lingkup pembangunan bidang SDA dan LH meliputi (1) revitalisasi pertanian, dan (2) perbaikan pengelolaan SDA dan perbaikan fungsi LH. Pelaksanaan dari kebijakan ini memberikan hasil terhadap meningkatnya peran SDA dan LH dalam perkembangan perekonomian nasional. Hal ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH terhadap pembentukan PDB nasional selama periode tersebut. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di perdesaan dan pesisir.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 5 prioritas nasional yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

1. Prioritas ke-1: **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**, yang akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kinerja kementerian dalam pelayanan publik,

pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian, penataan organisasi, dan pemangkasan *red tape* yang terkait bidang kelautan dan perikanan.

2. Prioritas ke-4: **Penanggulangan Kemiskinan**, yang dalam implementasinya akan dilaksanakan untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan absolut nasional dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar melalui perluasan jangkauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan dan Perikanan, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan menjadi usaha yang *bankable*.
3. Prioritas ke-5: **Ketahanan Pangan**, yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk perikanan, peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan kontribusi PDB perikanan tanpa migas menjadi 6,5% pada tahun 2014 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya sebesar 115 pada tahun 2014, melalui peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan, dan stabilisasi harga ikan.
4. Prioritas ke-9: **Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**, yang akan dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana melalui pengembangan kawasan konservasi laut dan perairan, dan pengembangan SDM dan riset tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut.
5. Prioritas ke-10: **Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pasca Konflik**, yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan terdepan, serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik yang akan diimplementasikan melalui

pengelolaan/pemberdayaan pulau-pulau terluar dan pengembangan ekonomi alternatif berbasis sumber daya perikanan.

Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan kelautan dan perikanan akan mendukung 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni: (1) **ekonomi**, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi kelautan dan perikanan pada PDB nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2) **sosial**, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marjinal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) **lingkungan hidup**, dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah :

1. Pro poor

Pendekatan *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

2. Pro job

Pendekatan *Pro-job* dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.

3. Pro growth

Pendekatan *pro-growth* dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.

4. *Pro sustainability*

Pendekatan *pro-sustainability* dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan keempat arah kebijakan di atas dilakukan melalui:

1. Pengembangan Minapolitan

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan minapolitan bertujuan untuk (i) meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, (ii) meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata, serta (iii) mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Adapun sasaran pengembangan minapolitan adalah sebagai berikut (i) ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, (ii) usaha kelautan dan perikanan kelas menengah ke atas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta (iii) sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pendekatan pengembangan minapolitan dilakukan melalui:

a. Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah

Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.

b. Kawasan Ekonomi Unggulan

Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria (i) bernilai ekonomis tinggi, (ii) teknologi tersedia, (iii) permintaan pasar besar, dan (iv) dapat dikembangkan secara massal.

c. Sentra Produksi

Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.

d. Unit Usaha

Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.

e. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.

f. Lintas Sektor

Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait untuk mendukung kepastian usaha antara lain terkait dengan sarana dan prasarana pemasara produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengembangkan Minapolitan antara lain:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana perikanan seperti (i) pengembangan pelabuhan perikanan dengan prioritas di lingkaran luar (*outer ring fishing port*) Indonesia di 25 lokasi, (ii) pengembangan kapal dan alat penangkapan ikan sebesar 5.100 unit, (iii) pengembangan kawasan budidaya di 541 kawasan yang terdiri dari 145 kawasan

- budidaya perikanan payau, 238 kawasan budidaya perikanan tawar dan 158 kawasan budidaya perikanan laut, (iv) memenuhi seluruh kebutuhan benih ikan yang mencapai sekitar 69,7 miliar ekor benih, (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (seperti; pengembangan sistem rantai dingin (*cold chain system*), sentra pengolahan, klaster/minapolitan industri hasil perikanan dan pasar ikan) di 33 provinsi;
- b. Pengembangan ekspor melalui pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berpotensi ekspor sebanyak 250 UKM berpotensi ekspor sampai dengan tahun 2014;
 - c. Mendorong peningkatan nilai investasi perikanan mencapai Rp7,5 triliun;
 - d. Perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang mampu menjangkau 2 juta usaha kecil dan menengah di 300 kabupaten/kota;
 - e. Pengembangan lembaga pembiayaan kelautan dan perikanan yang mampu menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp50 miliar per tahun sampai dengan tahun 2014 melalui program KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank)
 - f. Pembangunan prasarana pulau-pulau kecil di 100 pulau, khususnya di pulau-pulau kecil terluar
 - g. Peningkatan kapasitas skala usaha dan kewirausahaan mencapai: (i) usaha di perikanan tangkap mencakup 2.000 Kelompok Usaha Bersama (KUB), (ii) usaha di perikanan budidaya mencakup 3.388 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta (iii) usaha di pengolahan dan pemasaran: 3.860 Unit Pengolahan Ikan (UPI)

2. *Entrepreneurship*

Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala usaha (*entrepreneurship*) dilaksanakan melalui upaya membangun kepercayaan (*trust building*) bagi para pelaku, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan. Jiwa *entrepreneurship* para pelaku tersebut dibangun agar para pelaku dapat memanfaatkan fasilitas guna memperlancar pengelolaan usaha, baik yang diperoleh melalui kredit maupun melalui program-program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Strategi

entrepreneurship akan memenuhi kebutuhan nelayan dan pembudidaya serta pemasar dan pengolah dalam memproduksi seperti kapal, BBM, jaring, benih, pengairan dan lain-lainnya, serta pemerintah mengupayakan kepastian pasar bagi penjualan produk perikanan dengan harga yang pantas.

Pengembangan kewirausahaan dilakukan dalam rangka penciptaan usaha di sektor kelautan dan perikanan bagi sarjana yang masih menganggur. Kegiatan yang dilakukan adalah pembekalan dan motivasi dilanjutkan dengan pelatihan/magang mengenai budidaya perikanan, penangkapan, pengolahan dan pemasaran serta pembuatan proposal. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh bantuan permodalan baik dari lembaga keuangan, BUMN, swasta maupun dari pemerintah melalui dana APBN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda, KKP memiliki UPT yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan teknis/magang budidaya perikanan, penangkapan, dan pengolahan.

3. Networking

Setiap individu, institusi, dan setiap wilayah punya potensi masing-masing yang sangat besar di samping juga masing-masing memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun demikian setiap pelaku pembangunan kelautan dan perikanan bekerja sendiri-sendiri. Sampai saat ini masih ada pemangku kepentingan pembangunan kelautan dan perikanan yang belum terhimpun dalam suatu bentuk jaringan kerja bahkan masih terlihat indikasi bahwa masing-masing masih mengutamakan identitas diri. Keadaan tersebut akan berpengaruh pada hasil kerja yang kurang optimal dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan hasil pembangunan kelautan dan perikanan dengan memfasilitasi pengembangan jejaring kerja. Melalui penciptaan dan penguatan *networking*, baik secara internal antar eselon I di lingkup KKP, antara pusat-daerah, antar daerah, antar instansi/lintas sektor, komunitas bisnis, kerjasama internasional (bilateral, multilateral, dan regional).

Melalui pembentukan jejaring kerja akan terbina interaksi yang baik, secara langsung dan tidak langsung, antara berbagai pemangku kepentingan dan instansi pemerintah, sehingga terjalin suatu kesatuan yang lebih besar dan kuat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengeliminir kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

4. *Technology and Innovation*

KKP akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan hanya jika dapat menguasai teknologi perikanan untuk sistem akuakultur, penangkapan, pengolahan dan pasca panen, serta teknologi kelautan untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut serta adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menemukan teknologi-teknologi baru dalam rangka meningkatkan optimasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan bertanggung jawab.

5. *Empowering*

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat, maka dibutuhkan pemberdayaan masyarakat.

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara umum, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal.

Pemberdayaan masyarakat ini dalam jangka panjang diarahkan untuk (i) peningkatan kemandirian masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan masyarakat,

(ii) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan, (iii) pengembangan kemitraan dengan lembaga swasta dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan komitmen KKP dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan antara lain pembudidayaan ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, pengawasan sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini akan dilakukan (i) identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaannya berbasis desa (ii) melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat, (iii) meningkatkan kapasitas aparatur sebagai pengelola di wilayahnya, (iv) memperbaiki kualitas masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan permasalahan yang dihadapi terkait dengan peningkatan kapasitas usaha, (v) memanfaatkan secara optimal kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dibentuk oleh berbagai program sebelumnya atau membentuk kelompok masyarakat baru, (vi) mengoptimalkan peran tenaga pendamping sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pelaporan di tingkat desa serta melakukan sosialisasi, serta (vii) menerapkan upaya pemberdayaan secara konsisten dan berkelanjutan dengan pola *bottom up* sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan merupakan aspirasi kelompok masyarakat di wilayahnya.

6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat

Keberadaan kelompok masyarakat di bidang budidaya, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kelompok pengawasan akan memberikan keuntungan bagi anggota kelompoknya. Melalui kelompok akan terjadi interaksi antar anggota untuk saling tukar pengalaman dan menumbuhkan kesadaran bersama untuk menguatkan

posisi tawar, serta kemudahan dalam pembinaan, penyampaian informasi, dan diseminasi teknologi.

Berbagai kelompok tercakup dalam Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan), KUB (Kelompok Usaha Bersama) penangkapan ikan, Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), dan Pokmas (Kelompok Masyarakat) pengelola terumbu karang. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk akan terus diupayakan keberadaannya dan ditingkatkan kapasitasnya, sedangkan kelompok-kelompok baru akan ditumbuhkan. Pembentukan atau penguatan kelompok secara modern dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kebijakan tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan dalam 5 tahun ke depan menjadi bagian dari pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan diarahkan pada pencapaian dua prioritas bidang, yakni (i) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta (ii) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Untuk mendukung prioritas bidang tersebut, maka kontribusi pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, maka KKP akan meningkatnya ketersediaan bahan pangan dalam negeri, termasuk ketersediaan ikan untuk konsumsi masyarakat dari 30,47 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 38,67 kg/kapita/tahun pada tahun 2014, dengan sasaran produksi perikanan dari 10,76 juta ton pada tahun 2010 menjadi 22,39 juta ton pada tahun 2014.

Disamping itu, KKP akan mendorong peningkatan kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas dari 3,0% pada tahun 2010 menjadi 6,5% pada tahun 2014, meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari USD 2,9 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 5,0 miliar pada tahun 2014, dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dari 105 pada tahun 2010 menjadi 1115 pada tahun 2014.

Fokus prioritas yang terkait adalah (1) peningkatan produksi dan produktivitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri, (2) peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk perikanan, dan (3) peningkatan kapasitas masyarakat perikanan.

2. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kontribusi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah wilayah perikanan Indonesia yang bebas *Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dari 34% pada tahun 2010 menjadi 89% pada tahun 2014, mewujudkan pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar sebanyak 200 pulau pada tahun 2014, mewujudkan upaya rehabilitasi dan konservasi laut dan perairan dari 13,5 juta ha pada tahun 2010 menjadi 15 juta ha pada tahun 2014, mewujudkan kerjasama internasional dan antar daerah, dan meningkatkan riset dan iptek kelautan.

Berdasarkan target Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang SDA-LH serta arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada maka tahun 2010 - 2014 Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai sebagaimana tersebut pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Rincian	Sasaran					Rata-rata Kenaikan (%/thn)
		2010	2011	2012	2013	2014	
A. FUNGSI EKONOMI							
1.	Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas (%)	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	21,41
2.	Produksi Perikanan (juta ton)	10,76	12,26	14,86	18,49	22,39	20,16
	• Perikanan Tangkap	5,38	5,41	5,44	5,47	5,50	0,55
	• Perikanan Budidaya	5,38	6,85	9,42	13,02	16,89	33,19
3.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD miliar)	2,9	3,2	3,6	4,1	5,0	14,67
4.	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	30,47	31,64	32,39	33,17	38,67	6,29
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (unit)*	444	449	454	459	464	1,10
6.	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan	105	107	110	112	115	2,30
B. FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP							
1.	Luas kawasan konservasi laut dan perairan (juta ha)**	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-
2.	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (pulau)***	20	55	60	50	20	-
3.	Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing (%)	62%	75%	82%	91%	100%	12,79

Keterangan :

*) Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang menjadi target sasaran pada tahun bersangkutan

**) Luas target kawasan konservasi laut dan perairan pada tahun bersangkutan

***) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang menjadi target pengelolaan pada tahun bersangkutan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 yang telah diuraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya

tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengelolaan Sumberdaya Ikan
- b. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
- c. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
- d. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
- e. Pengembangan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT).

Unit kerja penanggungjawab program adalah Ditjen PT.

2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
- b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
- c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
- d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
- e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
- f. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
- g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB).

Unit kerja penanggungjawab program adalah Ditjen PB.

3. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- b. Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- c. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan
- d. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan
- e. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan
- f. Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP).

Unit kerja penanggungjawab program adalah Ditjen P2HP.

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan program adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
- c. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

- d. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
- e. Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K).

Unit kerja penanggungjawab program adalah Ditjen KP3K.

5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- b. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan
- c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
- d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan
- e. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP).

Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen P2SDKP.

6. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Tujuan program ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran termemanfaatkannya iptek hasil penelitian dan pengembangan oleh para pemangku kepentingan. Untuk

mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap
- b. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya
- c. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan
- d. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumberdaya Non Hayati Pesisir dan Laut
- e. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
- f. Penelitian Dan Perekayasa Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP).

Unit kerja penanggungjawab program adalah BRKP.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tujuan program adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- b. Pelatihan Kelautan dan Perikanan
- c. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- d. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP).

Unit kerja penanggungjawab program adalah BPSDMKP.

8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabilitas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program

meningkatnya prosentase capaian kinerja pembangunan KP. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat I dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sekretariat Jenderal dan BPSDMKP
- b. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat II dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen PT dan Ditjen P2SDKP
- c. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat III dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen PB dan Ditjen DJKP3K
- d. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat IV dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen P2HP dan BRKP
- e. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta Pengawasan pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal
- f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Unit kerja penanggungjawab program adalah Inspektorat Jenderal.

9. Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan KP
- b. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP
- c. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP

- d. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP
- e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP
- f. Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan
- g. Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan
- h. Pengembangan dan Pembinaan Kerjasama Internasional dan Antarlembaga Bidang Kelautan dan Perikanan
- i. Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan

Unit kerja penanggungjawab program adalah Sekretariat Jenderal.

Target pembangunan 2010-2014 menurut program dan kegiatan yang telah terinci dalam *output* dan *outcome* dapat dilihat pada Lampiran II.

Pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, yakni dengan pagu indikatif sebesar Rp30,42 triliun. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membiayai 9 program yang terdiri dari 58 kegiatan, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui mekanisme dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Rincian kebutuhan pendanaan per program dan per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran III.

C. Dukungan Lintas Sektor

Pembangunan kelautan dan perikanan secara utuh memerlukan dukungan instansi terkait serta peran serta masyarakat luas. Adapun beberapa bentuk dukungan kegiatan yang diperlukan dari instansi lain sebagaimana tersebut pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Dukungan Lintas Sektor

No	Bidang	Kegiatan
1.	IPTEK	Penelitian Oceanografi
2.	Sarana dan Prasarana	a. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian;

No	Bidang	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai; c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan; d. Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut; e. Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan; f. Pelayanan Angkutan Udara Perintis; g. Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi; dan h. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan jalan lingkungan.
3.	Politik	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan dan kelautan.
4.	Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan OMSP matra udara; b. Peningkatan operasi bersama keamanan Laut; c. Peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut; dan d. Pembinaan kepolisian perairan.
5.	Wilayah dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan; dan b. Peningkatan ketersediaan data dan informasi survei sumber daya alam dan lingkungan hidup matra laut.
6.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut; b. Pengelolaan meteorologi penerbangan dan maritim BMKG; c. Penelitian dan pengembangan geologi kelautan; dan d. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).

BAB IV PENUTUP

RENSTRA Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2014 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh KKP, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi KKP, visi serta misi Presiden terpilih serta program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II masa bakti 2009-2014, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2010-2014, merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Negara/Lembaga setiap tahunnya. RENSTRA ini juga merupakan acuan perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
PROGRAM								
1	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan	1) Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) 2) Jumlah pendapatan nelayan: • pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp) • pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)	5.384.740 1.769.220 601.730	5.409.100 1.903.290 721.384	5.436.290 2.057.530 837.038	5.467.120 2.235.900 952.692	5.500.000 2.441.550 1.200.000
KEGIATAN								
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	1) Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pengkayaan SDI 2) Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun) 3) Jumlah perairan teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya 4) Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya	6 prov 8 prov 1 WPP 11 prov	33 prov 8 prov 11 WPP 4 prov	33 prov 8 prov 11 WPP 4 prov	33 prov 8 prov 11 WPP 4 prov	33 prov 8 prov 11 WPP 4 prov

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
b.	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	1) Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan	500 uni t	550 uni t	600 uni t	650 uni t	700 uni t
			2) Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar	600 uni t	976 uni t	1,552 uni t	2,259 uni t	2,929 uni t
			3) Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi	60 orang	120 orang	180 orang	210 orang	240 orang
c.	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	1) Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial	968 uni t	973 uni t	978 uni t	983 uni t	988 uni t
			2) Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk	35 Lokasi	35 Lokasi	40 Lokasi	40 Lokasi	40 Lokasi
			3) Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	10	20	30	40	50
d.	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu.	1) Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha perikanan tangkap	8.000 SIUP, SIPI/SIKPI	9.000 SIUP, SIPI/SIKPI	10.000 SIUP, SIPI/SIKPI	11.000 SIUP, SIPI/SIKPI	12.000 SIUP, SIPI/SIKPI
			2) Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
			3) Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP	4.900 SIPI	5.900 SIPI	6.900 SIPI	7.900 SIPI	8.900 SIPI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
e.	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.	1) Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI	1 PP 5 PPI
			2) Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.	999 KUB	1.200 KUB	1.400 KUB	1.600 KUB	1.800 KUB
			3) Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable	999 KUB	1.200 KUB	1.400 KUB	1.600 KUB	1.800 KUB
f.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap	Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen PT.	Persentase perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	70%	75%	80%	90%	100%
PROGRAM								
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budi daya.	1) Volume produksi perikanan budi daya (ton)	5.376.200	6.847.500	9.415.700	13.020.800	16.891.000
			2) Jumlah benih dengan mutu terjamin.	36 miliar ekor Benih ikan	42,2 miliar ekor Benih ikan	50,3 miliar ekor Benih ikan	59,5 miliar ekor Benih ikan	69,7 miliar ekor Benih ikan
				267.280 ton Bibit rumput laut	350.420 ton Bibit rumput laut	510.000 ton Bibit rumput laut	750.000 ton Bibit rumput laut	1.000.000 ton Bibit rumput laut
			3) Jumlah kawasan perikanan budi daya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	76 kab/kota	116 kab/kota	157 kab/kota	197 kab/kota	238 kab/kota
				45 kawasan payau	70 kawasan payau	95 kawasan payau	120 kawasan payau	145 kawasan payau
				76 kawasan tawar	116 kawasan tawar	157 kawasan tawar	197 kawasan tawar	238 kawasan tawar
				56 kawasan laut	81 kawasan laut	107 kawasan laut	132 kawasan laut	158 kawasan laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
KEGIATAN								
a	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan mutu terjamin dan data akurat.	1) Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar.	1,4 juta ton	1,8 juta ton	2,5 ton	3.4 juta ton	4,6 juta ton
			2) Jumlah produksi perikanan budidaya air payau.	1.137.920 ton	1.322.280 ton	1.587.640 ton	1.831.620 ton	2.022.220 ton
			3) Jumlah produksi perikanan budidaya laut	2.846.475 ton	3.703.400 ton	5.348.850 ton	7.780.675 ton	10.288.175 ton
			4) Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.	1.000 unit	2.000 unit	4.000 unit	6.000 unit	7.000 unit
b.	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Terpenuhi nya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat.	1) Jumlah produksi induk unggul.	6,5 juta ekor induk	8 juta ekor induk	10,1 juta ekor induk	12,6 juta ekor induk	15 juta ekor induk
				267.280 ton	350.420 ton	510.000 ton	750.000 ton	1.000.000 ton
			2) Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar	51 unit	63 unit	78 unit	96 unit	116 unit
c.	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.	1) Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis.	25 unit Lab. Kualitas air	31 unit Lab. Kualitas air	38 unit Lab. Kualitas air	43 unit Lab. Kualitas air	48 unit Lab. Kualitas air
			Catatan : HPI : Hama Penyakit Ikan	20 unit Lab. HPI	24 unit Lab. HPI	28 unit Lab. HPI	32 unit Lab. HPI	35 unit Lab. HPI
				9 unit Lab. Residu	11 unit Lab. Residu	14 unit Lab. Residu	18 unit Lab. Residu	25 unit Lab. Residu
			2) Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang di konservasi.	350 kab	350 kab	400 kab	350 kab	450 kab

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
d.	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Kawasan potensi perikanan budi daya menjadi kawasan Mianapolitan dengan usaha yang <i>bankable</i> .	1) Jumlah kelompok usaha perikanan budi daya yang memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi.	157 kelompok	788 kelompok	1.576 kelompok	1.957 kelompok	3.388 kelompok
				394 orang	1.182 orang	1.892 orang	1.970 orang	2.364 orang
			2) Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi	936 unit usaha	1.203 unit usaha	1.826 unit usaha	3.061 unit usaha	4.948 unit usaha
			LSSM : lembaga sertifikat sistem mutu	19 Lab uji	26 Lab uji	33 Lab uji	36 Lab uji	43 Lab uji
				3 LSSM	4 LSSM	7 LSSM	11 LSSM	15 LSSM
e.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Kawasan perikanan budi daya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.	Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.	1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan	1.167.666 Ha, 90 potensi kawasan	1.226.666 Ha, 100 potensi kawasan	1.291.666 Ha, 130 potensi kawasan	1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan
f.	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budi daya	Sentra produksi perikanan budi daya yang memiliki komoditas unggulan dan menerapkan teknologi inovatif.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat.	100%	100%	100%	100%	100%
g.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budi daya	Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen PB.	Persentase perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
PROGRAM								
3	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan	Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah ragam produk ekspor, nilai ekspor atau volume ekspor, serta jumlah impor terkendali sesuai standar dan kebutuhan.	3,2% pangsa ekspor	3,2% pangsa ekspor	3,2% pangsa ekspor	3,2% pangsa ekspor	3,2% pangsa ekspor
				6 ragam produk ekspor	7 ragam produk ekspor	9 ragam produk ekspor	10 ragam produk ekspor	11 ragam produk ekspor
				US\$ 2,9 Milyar nilai ekspor	US\$ 3,2 Milyar nilai ekspor	US\$ 3,6 Milyar nilai ekspor	US\$ 4,2 Milyar nilai ekspor	US\$ 5 miliar nilai ekspor
				1,38 juta ton volume ekspor	1,58 juta ton volume ekspor	1,73 juta ton volume ekspor	2,07 juta ton volume ekspor	2,43 juta ton volume ekspor
				0,28 juta ton volume impor	0,32 juta ton volume impor	0,35 juta ton volume impor	0,41 juta ton volume impor	0,49 juta ton volume impor
KEGIATAN								
a.	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya volume produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin	1) Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan	58 lokasi	66 lokasi	72 lokasi	78 lokasi	84 lokasi
			2) Jumlah sentra pengolahan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
			3) Volume produksi dari UKM	2,3 juta ton	2,4 juta ton	2,5 juta ton	2,7 juta ton	2,8 juta ton

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
b.	Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan yang memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional	1) Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana prasarana sesuai standar mutu laboratorium	17 lab	22 lab	12 lab	18 lab	20 lab
			2) Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional	179 SNI	199 SNI	219 SNI	239 SNI	259 SNI
			3) Jumlah laboratorium uji mutu hasil perikanan yang memperoleh akreditasi dari KAN	17 lab	22 lab	12 lab	18 lab	20 lab
			4) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikasi	424 UPI	429 UPI 611 sertifikat	434 UPI	439 UPI	444 UPI
c.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan	1) Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar	18 TPI 7.061 pasar	36 TPI 7000 pasar	54 TPI 7000 pasar	72 TPI 7000 pasar	91 TPI 7000 pasar
			2) Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi	33 provinsi
d.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan	1) Jumlah penambahan negara tujuan ekspor	3	3	4	4	5
			2) Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor	50	50	50	50	50
e.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI	430 UPI	430 UPI	860 UPI	1.280 UPI	860 UPI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
f.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP	Terlaksananya seluruh perencanaan, pengendalian, pelaporan dan publikasi secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Ditjen P2HP.	Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (%)	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM								
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat	1) Jumlah kawasan pesisir yang tahan terhadap ancaman kerusakan, memiliki infrastruktur dasar serta jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan	10 kawasan, 2 kapal, 50 ribu ton	20 kawasan 3 kapal 100 ribu ton	30 kawasan 3 kapal 150 ribu ton	30 kawasan 2 kapal 100 ribu ton	50 kawasan 2 kapal 100 ribu ton
			2) Jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini serta terkendali pemanfaatannya	23 kawasan	28 kawasan	33 kawasan	33 kawasan	28 kawasan
			3) Jumlah kelompok usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	800.000 usaha	1.100.000 usaha	1.400.000 usaha	1.700.000 usaha	2.000.000 usaha
				120 unit	165 unit	210 unit	255 unit	300 unit
KEGIATAN								
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	1) kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha	900 ribu ha
			2) Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis	9 Kawasan dan 3 jenis

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
b.	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan	1) Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	6 kawasan	9 kawasan	11 kawasan	13 kawasan	11 kawasan
			2) Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini	23 kawasan	28 kawasan	33 kawasan	33 kawasan	28 kawasan
c.	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan	3) Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.	60 ha	1.000 ha	1.100 ha	1.400 ha	1.440 ha
			2) Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan. - BMKT - Garam - Deep sea water					
				2 kapal	3 kapal	3 kapal	2 kapal	2 kapal
				50 ribu ton	100 ribu ton	150 ribu ton	100 ribu ton	100 ribu ton
	200 ribu liter	500 ribu liter	1,5 juta liter	2 juta liter	3 juta liter			
d.	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	1) Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau
			2) Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
e.	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta usaha skala mikro di seluruh kawasan metropolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 kabupaten/kota pesisir.	Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang <i>bankable</i> .					
			- Pengembangan sarana usaha Mikro LKM	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit
			- Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM KP	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota	120 kab/kota
			- Tenaga pendamping	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang	480 orang
			- Kelompok Usaha Mikro	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha	800.000 usaha
f.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KP3K	Meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen KP3K	Persentase perencanaan dan kerjasama program anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Ditjen KP3K	90%	90%	90%	95%	95%
PROGRAM								
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indonesia bebas <i>Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing</i> serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	1) Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU Fishing</i>	62%	75%	82%	91%	100%
			2) Persentase pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	55%	68%	81%	93%	100%
KEGIATAN								
a	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan	1) Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan	280 kapal	880 kapal	1.480 kapal	2.080 kapal	2.680 kapal
			2) Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan	180 kapal	563 kapal	946 kapal	1.329 kapal	1.712 kapal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
b	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan <i>illegal</i> dan merusak	1) Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan	4 wilayah	9 wilayah	15 wilayah	21 wilayah	27 wilayah
			2) Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran	7 wilayah perairan	14 wilayah perairan	21 wilayah perairan	28 wilayah perairan	40 wilayah perairan
c	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU <i>fishing</i>	1) Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU <i>fishing</i>	3 WPP	3 WPP	4 WPP	5 WPP	5 WPP
			2) Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU <i>fishing</i>	6 WPP	6 WPP	6 WPP	6 WPP	6 WPP
d	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantauan Kapal Perikanan	Terpenuhi nya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	1) Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu - Kapal Pengawas - Speedboat - Stasiun Radar Satelit - Transmitter VMS					
				0	4	18	18	15
				15	32	28	32	30
				0	0	0	0	0
			0	1	0	0	0	
			2) Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu - Kantor dan Bangunan Pengawas - Dermaga - Pos Pengawas					
5	6	6		7	6			
2	6	6		7	6			
15	10	15	15	15				
e	Penyellesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah Kapal yang diperiksa	4000	4666	7666	10666	13166

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di tjen P2SDKP	Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan program anggaran dan SDM secara terintegrasi dan tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel di lingkungan Di tjen P2SDKP	Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan program anggaran dan SDM secara terintegrasi dan tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel di lingkungan Di tjen P2SDKP	92%	94%	95%	97%	100%
PROGRAM								
6	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan	1) Jumlah inovasi IPTEK yang : memperoleh pengakuan (HKI, SNI, dan Penghargaan), di rekomendasikan dan mempunyai model penerapan	3 inovasi IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)	3 inovasi IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)	3 inovasi IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)	2 inovasi IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)	2 inovasi IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)
			2) Hasil riset yang menjadi rekomendasi basis kebijakan dan di publikasi kan	5	6	7	8	10
KEGIATAN								
a.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap	Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelol aannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan	6 buah	6 buah	4 buah	4 buah	3 buah
b.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budi daya	HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.	Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan	5	5	5	5	5

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
c.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
				9 Inovasi	9 Inovasi	9 Inovasi	9 Inovasi	9 Inovasi
d.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Wilayah, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNH dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.	Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir, laut, serta pulau-pulau kecil	3 Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan	3 Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan	3 Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan	3 Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan	3 Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan
				1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut	1 paket data terkait fenomena alam laut, 5 paket data terkait SDNH, pesisir, dan laut
e.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/prospektif.	Jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.	3 Paket Teknologi	1 HKI, 3 Paket Teknologi	3 Paket Teknologi	1 HKI, 1 Rekomendasi 3 Paket Teknologi	4 Paket Teknologi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
f.	Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis mi napolitan.	Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis mi napolitan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi
				4 Model	4 Model	4 Model	4 Model	4 Model
g.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRKP	Perencanaan, pengendalian, pelaporan program, anggaran, pengelolaan SDM, fasilitasi HKI, serta publikasi terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan BRKP	Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program serta penganggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan BRKP.	85%	85%	90%	90%	95%
PROGRAM								
7	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	Lulusan pendidikan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan dapat diserap untuk kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri	980 orang	1.050 orang	1.120 orang	1.190 orang	1.260 orang
KEGIATAN								
a.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar serta persentase lulusan yang meningkatkan kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar	6.160 masyarakat 1.103 aparatur	8.000 masyarakat 1.300 aparatur	10000 masyarakat 1.600 aparatur	12.000 masyarakat 1.900 aparatur	15.000 masyarakat 2.200 aparatur
b.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang di suluh	300 Kelompok di 50 kawasan	400 Kelompok di 50 kawasan	500 Kelompok di 50 kawasan	600 Kelompok di 50 kawasan	700 Kelompok di 50 kawasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
c.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional	1.400 orang	1.400 orang	1.400 orang	1.400 orang	1.400 orang
d.	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP	Persentase perencanaan, pengendalian, pelaporan dan publikasi terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan BPSDMKP.	Persentase perencanaan dan kerjasama program anggaran secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan BPSDMKP.	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM								
8	Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	Pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan satker lingkup DKP yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pengendalian di lingkup DKP yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	30%	40%	50%	60%	70%
KEGIATAN								
a.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) dan BPSDMKP dan pelaksana pembangunan KP	Laporan hasil pengawasan Setjen dan BPSDMKP	Persentase satker lingkup Setjen dan BPSDMKP yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan BMN yang akuntabel dan tepat waktu	30%	40%	50%	60%	70%
b.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen P2SDKP serta pelaksana pembangunan KP	Laporan hasil pengawasan Ditjen PT dan Ditjen P2SDKP	Persentase satker mitra lingkup Ditjen PT dan Ditjen P2SDKP yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan BMN yang akuntabel dan tepat waktu	30%	40%	50%	60%	70%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
c.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen Perikanan Budi daya dan Ditjen KP3K serta pelaksana pembangunan KP	Laporan hasil pengawasan Ditjen PB dan Ditjen KP3K	Persentase satker lingkup Ditjen PB dan Ditjen KP3K yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan BMN yang akuntabel dan tepat waktu	30%	40%	50%	60%	70%
d.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen P2HP dan BRKP serta pelaksana pembangunan KP	Laporan hasil pengawasan Ditjen P2HP dan BRKP	Persentase satker lingkup Ditjen P2HP dan BRKP yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan dan BMN yang akuntabel dan tepat waktu	30%	40%	50%	60%	70%
e.	Pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja Inspektorat Jenderal	Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dan pelaksanaan SPIP	Persentase satker lingkup KKP yang melaksanakan SPIP dan Tindak Lanjut Temuan yang akuntabel dan tepat waktu	30%	40%	50%	60%	70%
f.	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen	Laporan perencanaan, pengendalian, pelaporan pelaksanaan program, anggaran dan SDM	Persentase perencanaan, pengendalian, pelaporan pelaksanaan program, anggaran dan SDM secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	40%	50%	60%	70%	80%
PROGRAM								
9	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup KKP	Persentase tercapainya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkup KKP	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
KEGIATAN								
a.	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu dan BLU pembiayaan.	Persentase perencanaan jangka menengah dan panjang yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu serta jumlah lintas sektor yang terintegrasi dengan perencanaan KKP	60%	65%	70 %	75 %	80%
Persentase perencanaan program kerja jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			60%	65%	70 %	75 %	80%	
Persentase perencanaan anggaran jangka pendek, menengah dan panjang yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			60%	65%	70 %	75 %	80%	
Persentase pengendalian dan pelaporan program kerja jangka pendek dan menengah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu			60%	65%	70 %	75 %	80%	
b.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang tata usaha pimpinan, kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi persuratan dan kearsipan	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang tata usaha pimpinan	65%	75%	80%	85%	90%
Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang kerumahtanggaan			60%	70%	75%	80%	90%	
Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang pengelolaan perlengkapan			60%	70%	75%	80%	90%	
Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang administrasi persuratan dan kearsipan			65%	75%	80%	85%	90%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
c.	Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanjian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, seraf pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase efektivitas dan kemutakhiran hukum laut sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta jumlah analisis dan rekomendasi yang diberikan	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase efektivitas dan kemutakhiran perjanjian dan perizinan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta persentase pelayanan bantuan hukum yang akuntabel	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase efektivitas dan kemutakhiran organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serta persentase Unit Kerja yang memiliki POS (Prosedur Operasional Standar) yang terintegrasi	50%	60%	70%	80%	90%
d.	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP	Persentase pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase revisi anggaran, penyiapan standar biaya khusus dan pengelolaan PNBPN yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%; 95%; 90%	100%; 97%; 95%	100%; 98%; 86%	100%; 100%; 97%	100%; 100%; 98%
			Persentase administrasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	90%	95%	97%	98%	100%
			Persentase akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase pelaksanaan anggaran dan penyelesaian ganti rugi, termasuk tuntutan ganti rugi LHA, yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	85%	90%	95%	98%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP	Persentase unit kerja yang memiliki alokasi SDM kompeten sesuai kebutuhan dengan sistem kaderisasi dan administrasi kepegawaian yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase Unit Kerja yang memiliki alokasi SDM kompeten sesuai kebutuhan dengan sistem kaderisasi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan pengangkatan dan mutasi pegawai yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase administrasi jabatan fungsional yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase administrasi kepegawaian yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu	90%	92%	95%	97%	98%
f.	Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP	Persentase unit kerja pusat dan provinsi yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen KKP dengan data yang lengkap, terkini dan akuntabel serta terbangunnya citra positif KKP	Persentase kelengkapan data dan statistik kelautan dan perikanan terkini dan akuntabel	25%	41 %	57 %	73%	90%
			Persentase unit kerja yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen KKP antara pusat dan provinsi	75%	79 %	83 %	87%	90%
			Jumlah stakeholder yang mendukung program KKP serta terbangunnya citra positif KKP	80%	83 %	85 %	88%	90%
			Persentase perencanaan, pengendalian, pelaporan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Pusdatin	55%	64 %	73 %	82%	90%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
g.	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan	Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI	Persentase pencapaian bebas penyakit ikan di karantina ikan	63,34%	70 %	75%	80%	83.34%
			Persentase perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Puskari	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
			Persentase laboratorium karantina ikan yang menerapkan inovasi metode pengujian yang terkini sesuai standar OIE dan SNI serta berfungsinya sistem informasi karantina secara online	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
			Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
			Persentase administrasi yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Puskari	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
			Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI di wilayah kerjanya	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %
			Jumlah rekomendasi standar pengujian laboratorium karantina ikan yang terkini, akuntabel dan tepat waktu	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2010	2011	2012	2013	2014
h.	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang KP	Persentase keberhasilan kerjasama internasional dan antar lembaga sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global	Persentase keberhasilan kerja sama internasional sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan kerja sama antar lembaga sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase perencanaan, pengendalian, pelaporan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan PusKita	92%	95%	98%	99%	100%
i.	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	Persentase perencanaan, pengendalian, pelaporan dan publikasi terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan DEKIN	Persentase fasilitasi perumusan kebijakan kelautan, publikasi dan dokumentasi, perencanaan, kerjasama, monitoring evaluasi serta pelaporan secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Dekin	50%	55 %	62%	70 %	80%
			Persentase administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Dekin	50%	55 %	62%	70 %	80%
			Persentase administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan yang akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Dekin	50%	55 %	62%	70 %	80%

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

**KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
		2010	2011	2012	2013	2014	
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
PROGRAM							
1	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	700	1.104	1.638	2.145	2.557	8.145
KEGIATAN							
a.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)	37,5	53,4	71,4	88,4	103,9	354,6
b.	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	29,5	53,0	79,8	100,9	120,8	384,0
c.	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	455,2	791,9	1.224,9	1.641,2	1.971,6	6.084,8
d.	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan	27,5	23,8	37,3	50,1	62,2	200,9
e.	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	30,0	55,7	91,5	125,2	151,6	454,1
f.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di tjen Perikanan Tangkap	120,6	126,6	133,0	139,6	146,6	666,4
PROGRAM							
2	Peningkatan Produksi Perikanan Budi daya	516,7	683,2	865,0	1.058,6	1.208,0	4.331,4
KEGIATAN							
a.	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	66,3	94,6	126,8	157,1	176,1	620,8
b.	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	61,7	82,7	107,9	131,9	150,1	534,3
c.	Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	54,9	93,7	138,0	179,6	212,2	678,3
d.	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	35,6	62,8	88,9	124,0	155,0	466,4
e.	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	46,5	89,2	134,7	178,0	219,1	667,5
f.	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budi daya	205,5	211,8	217,9	234,7	239,6	1.109,5
g.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di tjen. Perikanan Budi daya	46,2	48,3	50,8	53,3	56,0	254,6

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
		2010	2011	2012	2013	2014	
PROGRAM							
3	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	206,4	264,0	317,3	368,1	429,4	1.585,2
KEGIATAN							
a.	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	37,2	49,1	51,0	53,0	55,2	245,5
b.	Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15,2	31,8	47,6	62,5	76,8	233,8
c.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan	102,9	105,9	114,5	122,7	144,9	590,9
d.	Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan	3,5	10,9	19,3	27,2	33,3	94,1
e.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan	21,4	35,9	49,7	62,8	75,2	244,9
f.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di tjen P2HP	26,2	30,5	35,3	40,0	44,0	176,0
PROGRAM							
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	495,9	625,0	804,4	910,4	1.020,3	3.856,0
KEGIATAN							
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	73,5	109,8	151,2	190,2	220,7	745,4
b.	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	75,2	79,1	107,5	109,7	109,7	481,1
c.	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	35,8	53,7	100,0	105,0	110,0	404,5
d.	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	11,8	76,5	122,9	166,5	200,7	578,5
e.	Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat	237,0	240,2	253,7	266,5	303,2	1.300,6
f.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di tjen KP3K	62,6	65,7	69,0	72,5	76,1	345,9
PROGRAM							
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	324,4	456,0	616,3	771,5	881,4	3.049,6
KEGIATAN							
a.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	23,2	28,0	31,7	40,3	46,9	170,1
b.	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	13,2	15,0	17,5	18,8	22,4	87,0
c.	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas	117,2	216,3	329,4	435,6	518,8	1.617,3
d.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan	56,0	76,0	110,2	142,3	152,4	536,9
e.	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan	16,2	17,1	18,8	20,4	21,1	93,5
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di tjen P2SDKP	98,6	103,5	108,7	114,1	119,9	544,8

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
		2010	2011	2012	2013	2014	
PROGRAM							
6	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan	273,8	528,9	582,2	624,0	712,8	2.721,7
KEGIATAN							
a.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap	104,0	70,0	74,0	80,0	85,0	413,0
b.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budi daya	74,2	85,0	90,0	90,0	95,2	434,4
c.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan	23,8	50,0	52,0	57,0	60,0	242,8
d.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut	15,7	50,0	55,0	60,0	80,0	260,7
e.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	19,0	47,9	52,5	58,0	64,6	241,9
f.	Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	11,7	42,5	47,0	50,0	55,0	206,2
g.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRKP	25,4	183,5	211,7	229,0	273,0	922,6
PROGRAM							
7	Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	257,1	365,8	474,6	578,2	672,5	2.348,2
KEGIATAN							
a.	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	19,0	45,6	70,8	94,7	117,5	347,6
b.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	34,0	60,6	91,0	119,5	141,9	447,1
c.	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	97,3	147,4	195,1	240,3	283,3	963,4
d.	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP	106,8	112,1	117,8	123,6	129,8	590,1
PROGRAM							
8	Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	43,7	50,0	55,0	60,0	70,0	101,0
KEGIATAN							
a.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) dan BPSDMKP dan pelaksana pembangunan KP	3,0	4,0	4,0	5,0	6,0	22,0
b.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen P2SDKP serta pelaksana pembangunan KP	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	21,0
c.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen Perikanan Budi daya dan Ditjen KP3K serta pelaksana pembangunan KP	4,0	4,0	5,0	5,0	6,0	24,0
d.	Pengawasan akuntabilitas aparatur pada Ditjen P2HP dan BRKP serta pelaksana pembangunan KP	3,0	3,0	4,0	4,0	5,0	19,0
e.	Pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja Inspektorat Jenderal	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	15,0
f.	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen	28,7	32,0	35,0	38,0	44,0	177,7

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rp)					TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)
		2010	2011	2012	2013	2014	
PROGRAM							
9	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	194,8	732,9	961,4	1.063,0	1.153,2	4.105,3
KEGIATAN							
a.	Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP	15,0	131,0	131,0	132,0	133,0	542,0
b.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan	93,8	204,9	257,0	324,0	326,0	1.205,7
c.	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	8,00	10,0	12,0	16,0	20,0	66,0
d.	Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP	10,0	16,0	18,0	19,0	21,0	84,0
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawain KKP	8,1	12,0	14,0	14,0	16,0	64,1
f.	Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP	29,0	59,0	92,0	55,0	56,0	291,0
g.	Pengembangan dan Pembinaan Perkarantina Ikan	14,00	271,0	405,0	469,0	543,0	1.702,0
h.	Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang KP	7,2	18,0	20,4	22,0	25,2	92,8
i.	Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan	9,7	11,0	12,0	12,0	13,0	57,7
TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014							30.243,0

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PROYEKSI PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2010-2014

A. Tabel Proyeksi Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

No	Rincian	2009 ¹⁾	2010 ²⁾	2011 ³⁾	2012 ³⁾	2013 ³⁾	2014 ³⁾
1	Produksi (Ton)	5,285,020	5,348,440	5,412,620	5,477,570	5,543,300	5,609,820
	- Laut	4,789,410	4,846,880	4,905,040	4,963,900	5,023,470	5,083,750
	- Perairan Umum	495,610	501,560	507,580	513,670	519,830	526,070
2	Nilai Produksi (Rp 1.000.000)	56,077,350	65,161,880	75,718,100	87,984,430	102,237,900	118,800,440
	- Laut	50,863,530	59,103,420	68,678,170	79,804,030	92,732,280	107,754,910
	- Perairan Umum	5,213,820	6,058,460	7,039,930	8,180,400	9,505,620	11,045,530
3	Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Laut (Buah)	596,230	596,300	596,370	596,430	596,500	596,550
	- Perahu Tanpa Motor	205,460	149,080	101,380	53,680	29,830	-
	- Perahu Motor Tempel	233,530	113,300	95,420	77,540	35,790	11,930
	- KM < 5 GT	109,590	107,330	101,380	77,540	47,720	17,900
	- KM 5 - 10 GT	30,400	23,850	29,820	35,790	41,760	47,720
	- KM 10 - 30 GT	13,190	23,850	35,780	47,710	59,650	71,590
	- KM 30 - 50 GT	750	119,260	149,090	208,750	274,390	328,100
	- KM > 50 GT	3,310	59,630	83,490	95,430	107,370	119,310
4	Rata-rata pendapatan/ (RTP/PP) (Rp/Bl n)	3,342,680	3,596,720	3,870,070	4,164,200	4,480,680	4,821,210
	- Laut	4,686,700	5,042,890	5,426,150	5,838,540	6,282,270	6,759,720
	- Perairan Umum	909,890	979,040	1,053,450	1,133,510	1,219,660	1,312,350
5	Jumlah Nelayan (Orang)	2,752,490	2,741,480	2,730,510	2,719,590	2,708,720	2,697,880
	- Laut	2,255,650	2,246,630	2,237,640	2,228,690	2,219,780	2,210,900
	- Perairan Umum	496,840	494,850	492,870	490,900	488,940	486,980
6	Rata-rata pendapatan/ nelayan (Rp/Bl n)	1,140,710	1,366,570	1,637,150	1,961,310	2,349,650	2,814,880
	- Laut	1,257,130	1,506,040	1,804,240	2,161,480	2,589,450	3,102,160
	- Perairan Umum	612,150	733,360	878,570	1,052,530	1,260,930	1,510,590

Keterangan : 1) Angka sementara 2) Angka perkiraan 3) Angka proyeksi

B. Proyeksi Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi (Ton)

Provinsi	2009 ¹	2010 ²	2011 ³	2012 ³	2013 ³	2014 ³
Jumlah	4 789 410	4 846 880	4 905 040	4 963 900	5 023 470	5 083 750
Sumatera	1 446 900	1 464 260	1 481 830	1 499 600	1 517 610	1 535 810
Nanggroe Aceh Darussalam	132 360	133 950	135 560	137 190	138 840	140 510
Sumatera Utara	361 130	365 460	369 850	374 290	378 780	383 300
Sumatera Barat	190 520	192 810	195 120	197 460	199 830	202 230
Riau	89 550	90 620	91 710	92 810	93 920	95 050
Kepulauan Riau	229 630	232 390	235 180	238 000	240 860	243 750
Jambi	44 760	45 300	45 840	46 390	46 950	47 510
Sumatera Selatan	39 370	39 840	40 320	40 800	41 290	41 790
Kepulauan Bangka Belitung	153 300	155 140	157 000	158 880	160 790	162 720
Bengkulu	58 730	59 430	60 140	60 860	61 590	62 330
Lampung	147 550	149 320	151 110	152 920	154 760	156 620
J a w a	965 720	977 310	989 030	1 000 920	1 012 920	1 025 080
Banten	56 900	57 580	58 270	58 970	59 680	60 400
DKI Jakarta	147 410	149 180	150 970	152 780	154 610	156 470
Jawa Barat	179 730	181 890	184 070	186 280	188 520	190 780
Jawa Tengah	178 080	180 220	182 380	184 570	186 780	189 020
DI Yogyakarta	2 000	2 020	2 040	2 080	2 100	2 130
Jawa Timur	401 600	406 420	411 300	416 240	421 230	426 280
Bali - Nusatenggara	297 640	301 210	304 820	308 480	312 180	315 930
Bali	97 770	98 940	100 130	101 330	102 550	103 780
Nusa Tenggara Barat	100 820	102 030	103 250	104 490	105 740	107 010
Nusa Tenggara Timur	99 050	100 240	101 440	102 660	103 890	105 140
Kalimantan	328 820	332 770	336 780	340 810	344 900	349 040
Kalimantan Barat	77 410	78 340	79 280	80 230	81 190	82 160
Kalimantan Tengah	49 060	49 650	50 250	50 850	51 460	52 080
Kalimantan Selatan	108 460	109 760	111 080	112 410	113 760	115 130
Kalimantan Timur	93 890	95 020	96 170	97 320	98 490	99 670
Sulawesi	952 170	963 590	975 150	986 850	998 690	1 010 670
Sulawesi Utara	209 990	212 500	215 050	217 630	220 240	222 880
Gorontalo	64 090	64 860	65 640	66 430	67 230	68 040
Sulawesi Tengah	141 600	143 300	145 020	146 760	148 520	150 300
Sulawesi Selatan	254 790	257 850	260 940	264 070	267 240	270 450
Sulawesi Barat	69 520	70 350	71 190	72 040	72 900	73 770
Sulawesi Tenggara	212 180	214 730	217 310	219 920	222 560	225 230
Maluku - Papua	798 160	807 740	817 430	827 240	837 170	847 220
Maluku	321 280	325 140	329 040	332 990	336 990	341 030
Maluku Utara	145 830	147 580	149 350	151 140	152 950	154 790
Papua	229 240	231 990	234 770	237 590	240 440	243 330
Papua Barat	101 810	103 030	104 270	105 520	106 790	108 070
Keterangan : 1) Angka sementara 2) Angka perkiraan 3) Angka proyeksi						

C. Proyeksi Produksi Tuna Menurut Provinsi (Ton)

Provinsi	2009 ¹	2010 ²	2011 ³	2012 ³	2013 ³	2014 ³
Jumlah	196 230	198 580	200 960	203 370	205 810	208 280
Sumatera	20 070	20 320	20 570	20 820	21 080	21 340
Nanggroe Aceh Darussalam	9 010	9 120	9 230	9 340	9 450	9 560
Sumatera Utara	7 670	7 760	7 850	7 940	8 040	8 140
Sumatera Barat	2 250	2 280	2 310	2 340	2 370	2 400
Ri au	-	-	-	-	-	-
Kepul auan Ri au	-	-	-	-	-	-
Jambi	-	-	-	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
Kepul auan Bangka Bel i tung	-	-	-	-	-	-
Bengkulu	450	460	470	480	490	500
Lampung	690	700	710	720	730	740
J a w a	13 470	13 630	13 790	13 950	14 110	14 270
Banten	60	60	60	60	60	60
DKI Jakarta	4 920	4 980	5 040	5 100	5 160	5 220
Jawa Barat	2 180	2 210	2 240	2 270	2 300	2 330
Jawa Tengah	1 760	1 780	1 800	1 820	1 840	1 860
DI Yogyakarta	170	170	170	170	170	170
Jawa Timur	4 380	4 430	4 480	4 530	4 580	4 630
Bali - Nusatenggara	21 610	21 870	22 130	22 390	22 670	22 950
Bali	18 130	18 350	18 570	18 790	19 020	19 250
Nusa Tenggara Barat	2 040	2 060	2 080	2 100	2 130	2 160
Nusa Tenggara Timur	1 440	1 460	1 480	1 500	1 520	1 540
Kal imantan	120	120	130	130	130	130
Kal imantan Barat	-	-	-	-	-	-
Kal imantan Tengah	-	-	-	-	-	-
Kal imantan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kal imantan Timur	120	120	130	130	130	130
Sulawesi	105 750	107 010	108 290	109 600	110 900	112 230
Sulawesi Utara	55 500	56 160	56 830	57 510	58 180	58 880
Gorontalo	9 750	9 870	9 990	10 110	10 230	10 350
Sulawesi Tengah	5 790	5 860	5 930	6 000	6 070	6 140
Sulawesi Selatan	4 510	4 560	4 610	4 670	4 730	4 790
Sulawesi Barat	24 820	25 120	25 420	25 730	26 040	26 350
Sulawesi Tenggara	5 380	5 440	5 510	5 580	5 650	5 720
Maluku - Papua	35 210	35 630	36 050	36 480	36 920	37 360
Maluku	12 640	12 790	12 940	13 100	13 260	13 420
Maluku Utara	9 850	9 970	10 090	10 210	10 330	10 450
Papua	5 270	5 330	5 390	5 450	5 520	5 590
Papua Barat	7 450	7 540	7 630	7 720	7 810	7 900
Keterangan : 1) Angka sementara 2) Angka perki raan 3) Angka proyeksi						

D. Proyeksi Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi

No	Provinsi	Tahun						Kenaikan (%/th)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Jumlah		4.780.100	5.376.200	6.847.500	9.415.699	13.020.800	16.891.000	29,07
1	NAD	47.955	60.185	96.937	118.840	147.623	175.316	30,43
2	Sumatera Utara	104.668	112.076	129.037	164.988	203.649	236.360	17,91
3	Sumatera Barat	126.069	142.056	168.370	200.065	241.280	270.060	16,51
4	R i a u	44.939	65.467	100.728	150.399	232.380	361.452	51,78
5	Kepulauan Riau	8.212	45.144	59.339	112.458	166.805	222.304	130,46
6	J a m b i	27.289	38.699	56.731	86.447	132.493	202.409	49,36
7	Sumatera Selatan	180.038	215.830	288.630	411.680	601.950	883.500	37,85
8	Bangka Belitung	12.825	25.999	76.718	100.113	132.453	171.315	77,99
9	Bengkulu	19.973	23.680	32.320	43.900	54.220	62.098	25,78
10	Lampung	186.037	202.520	223.680	268.960	308.500	363.140	14,39
11	DKI Jakarta	8.168	15.907	19.668	25.331	32.253	40.651	40,11
12	Banten	47.736	72.670	96.500	130.730	157.760	181.100	31,19
13	Jawa Barat	562.706	653.878	749.176	950.872	1.189.467	1.440.463	20,78
14	Jawa Tengah	185.302	244.895	341.452	454.460	588.141	721.484	31,35
15	D.I. Yogyakarta	29.182	62.708	82.699	108.361	142.073	179.700	47,08
16	Jawa Timur	326.296	380.320	484.037	629.500	826.154	944.188	23,88
17	B a l i	146.182	159.420	196.800	270.730	328.405	383.920	21,66
18	Nusa Tenggara Barat	210.013	222.290	309.730	643.785	915.050	1.127.290	43,67
19	Nusa Tenggara Timur	701.934	683.449	805.361	906.852	1.393.370	1.913.733	23,76
20	Kalimantan Barat	24.261	29.724	37.533	47.382	59.431	65.239	22,05
21	Kalimantan Tengah	13.058	21.236	32.434	47.459	72.034	106.924	52,38
22	Kalimantan Selatan	30.563	51.906	77.141	116.148	180.720	282.832	56,22
23	Kalimantan Timur	113.095	130.402	177.812	230.382	285.454	319.505	23,41
24	Sulawesi Utara	61.480	79.140	139.090	199.320	460.950	567.100	60,41
25	Gorontalo	79.179	86.640	133.241	196.851	334.951	538.002	48,35
26	Sulawesi Tengah	314.599	318.674	374.450	428.193	635.010	942.050	25,96
27	Sulawesi Barat	71.722	86.323	169.784	223.277	328.750	334.032	39,48
28	Sulawesi Selatan	735.455	758.168	797.179	938.023	1.217.260	1.613.897	17,65
29	Sulawesi Tenggara	179.230	186.420	239.610	645.900	854.370	1.269.930	56,60
30	Maluku	121.092	131.498	201.690	302.161	402.703	503.345	34,01
31	Maluku Utara	41.616	42.329	82.661	153.198	203.995	255.077	48,11
32	Papua	7.360	13.747	33.985	55.286	86.637	107.443	75,48
33	Papua Barat	11.867	12.801	32.979	53.649	104.509	105.139	64,71

E. Proyeksi Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas

No.	Rincian	2009 *)	2010	2011	2012	2013	2014	Kenai kan (%/th)
Jumlah		4.780.100	5.376.200	6.847.500	9.415.699	13.020.800	16.891.000	29,07
1	Udang	348.100	400.300	460.000	529.000	608.000	699.000	14,96
	Udang windu	103.450	109.140	115.720	128.700	148.500	188.000	12,95
	Udang vaname	244.650	291.160	344.280	400.300	459.500	511.000	15,90
2	Bandeng	291.300	349.600	419.000	503.400	604.000	700.000	19,18
3	Patin	132.600	225.000	383.000	651.000	1.107.000	1.883.000	70,00
4	Lele	200.000	270.600	366.000	495.000	670.000	900.000	35,10
5	Nil a	378.300	491.800	639.300	850.000	1.105.000	1.242.900	27,09
6	Rumput laut	2.574.000	2.672.800	3.504.200	5.100.000	7.500.000	10.000.000	32,18
7	Kerapu	5.300	7.000	9.000	11.000	15.000	20.000	30,51
8	Kakap	4.600	5.000	5.500	6.500	7.500	8.500	13,12
9	Gurame	38.500	40.300	42.300	44.400	46.600	48.900	4,90
10	Mas	254.400	267.100	280.400	300.000	325.000	350.000	6,60
11	Lai nnya	553.000	646.700	738.800	925.400	1.032.700	1.038.700	13,72

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

